

**KONSEP PROF. DR. MUBYARTO TENTANG EKONOMI PANCASILA
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Serta Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)
Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Suska – Riau**



OLEH :

FITRA WARDIKA
NIM: 10525001229

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAK

Adapun skripsi ini berjudul **“KONSEP PROF. DR. MUBYARTO TENTANG EKONOMI PANCASILA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”**. Pembahasan ini dilatar belakangi oleh banyaknya kritikan terhadap pemikiran Mubyarto, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, bagaimana sebenarnya konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila sehingga mendapat banyak kritikan dan bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep beliau.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yang berjudul *“Ekonomi Pancasila”* karangan Prof. Dr. Mubyarto dan ditambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisa data content analisis.

Setelah penulis menelaah konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila, penulis melihat bahwa ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah suatu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada sila kelima Pancasila yang merupakan tujuan dari ekonomi Pancasila itu sendiri.

Konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditandai dengan adanya kesamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan sosial yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis. Ini dikatakan sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam karena dibuku primer yang diteliti oleh peneliti mengatakan demikian, yakni tujuan dari ekonomi Pancasila itu adalah untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : BIOGRAFI PROF. DR. MUBYARTO

A. Riwayat Singkat Perjalanan Hidup Prof. Dr. Mubyarto.....	13
B. Pendidikan dan Kepribadian Prof. Dr. Mubyarto.....	14
C. Karir Prof. Dr. Mubyarto Semasa Hidupnya.....	15
D. Karya-Karya Prof. Dr. Mubyarto.....	19

BAB III : EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM

A. Ekonomi Pancasila	
1. Pengertian Ekonomi Pancasila.....	21
2. Dasar Ekonomi Pancasila.....	23

3. Sistem Ekonomi Pancasila	24
4. Karakteristik Ekonomi Pancasila	26
B. Ekonomi Islam	
1. Pengertian Ekonomi Islam	29
2. Landasan Ekonomi Islam	33
3. Sistem Ekonomi Islam	35
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	39
5. Karakteristik Ekonomi Islam	42

BAB IV : EKONOMI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila	44
B. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Konsep Ekonomi Pancasila menurut Prof. Dr. Mubyarto	51

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan derasny arus globalisasi, sehingga sistem pasar bebas mampu menerobos kehidupan ekonomi banyak negara di dunia. Bahkan negara yang semula bertentangan dengan sistem pasar bebas ini, yakni komunisme dan kemudian akhirnya secara terus terang telah memberlakukan sistem yang dulu dikutuknya itu. Adapun sistem pasar bebas ini adalah konsepsi derivatif dari sistem liberalisme dan kapitalisme Barat, bararti bahwa terbukanya perdagangan antar negara tanpa batas-batas atau campur tangan siapapun.¹

Demikian pula negara-negara lainnya seperti Indonesia, bukanlah kekecualian yang steril dari pengaruh sistem pasar bebas. Kendati secara normatif unsur bebas tidak dikehendaki, namun kebijaksanaan pragmatis seperti *deregulasi* (tindakan yang tidak menurut aturan semula secara resmi) dan *debirokratisasi* (penyimpangan aturan dalam birokrasi) nampaknya telah memberikan kelonggaran bagi berlangsungnya unsur tersebut. Kebijakan pemerintah tersebut, sebenarnya cukup beralasan.²

Dawam Raharjo mengatakan bahwa:

“Indonesia memang berada dalam kondisi dilematis. Pemerintah, menurutnya berada dalam 2 kecendrungan, yakni kecendrungan *pragmatis*, dalam arti mengikuti perkembangan ekonomi dunia saat ini, dan kecendrungan untuk berpegang teguh pada prinsip yang sudah ditetapkan oleh para ekonom Indonesia, seperti Bung Hatta, yang terpengaruh konsep Pancasila sebagai ideologi dan UUD

¹ Dawam Raharjo, *Pragmatisme dan Utopia, Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 5

² Mohammad Bedjoui, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), Cet. Ke-2, hal. 15.

1945 terutama pasal 33, yang kemudian terbentuk sistem ekonomi Pancasila sebagai alternatif sistem perekonomian Indonesia.”³

Pemikiran tentang ekonomi Pancasila dengan segala liku-likunya mengalami perkembangan terus-menerus. Meskipun bagi sebagian orang awam mungkin dipandang terlalu lamban, atau bahkan bagi sebagian ahli dianggap maju-mundur, namun tidak berhenti.

Bila hanya ada satu perbedaan besar antara sistem ekonomi Pancasila dan sistem ekonomi yang masih belum sempurna yang sekarang masih berlaku di negara kita, maka sistem ekonomi Pancasila haruslah lebih berkeadilan sosial.⁴

Banyak di antara kita yang tidak ragu-ragu lagi menyatakan, bahwa sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia dewasa ini mengandung unsur-unsur yang kuat dari sistem pasar bebas yang kapitalistik. Walaupun pendapat ini banyak dibantah karena besarnya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi, dan karena adanya perencanaan sentral yang kuat dari Bappenas, namun pengalaman menunjukkan bahwa unsur-unsur pasar bebas lebih menonjol.⁵

Dalam persaingan yang merupakan nafas sistem pasar, mereka mudah terdesak oleh sektor yang besar, padat modal dan padat teknologi. Bahkan pada gilirannya, tak jarang skala ekonomi kecil yang digarapnya menjadi tidak mempunyai kekuatan yang berarti untuk bermain dalam persaingan tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya pasar bebas tidak dipraktekkan di Indonesia, tetapi yang perlu diterapkan adalah sistem ekonomi pasar terkendali, yang berarti bahwa pemerintah harus dapat mengendalikan pasar, melakukan berbagai intervensi pasar, terutama apabila kepentingan negara dan masyarakat dirugikan.⁶

³ *Ibid.*, h. 16

⁴ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. vii.

⁵ *Ibid.*, h. viii.

⁶ *Ibid.*

Sri-Edi Swasono mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.⁷

Dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978 disebutkan bahwa Pancasila adalah merupakan jiwa, kepribadian serta pandangan hidup bangsa Indonesia. Disamping itu, Pancasila juga merupakan dasar dan ideologi negara Republik Indonesia. Oleh karenanya, maka Pancasila merupakan satu-satunya asas yang menjadi penuntun dan pegangan hidup bagi warga negara Indonesia dalam sistem kehidupan sosialnya dalam berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.⁸

Diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas berbangsa, bermasyarakat dan bernegara seperti disebut di atas mengundang implikasi bahwa pembangunan nasional juga merupakan proses transformasi ke arah masyarakat Pancasila. Dengan perkataan lain, pembangunan nasional juga sekaligus merupakan upaya agar nilai yang dikandung dalam ke lima sila-sila Pancasila tercermin dalam praktek-praktek kehidupan sosialnya sehari-hari. Ini berarti Pancasila harus dapat tercermin pada jenis lembaga-lembaga yang ada, pada nilai-nilai serta norma-norma idiilnya dan pada mekanisme kerja serta aturan permainan yang mengikat lembaga-lembaga yang ada dalam sistem kehidupan sosial bangsa Indonesia.⁹

Proses pemenuhan kebutuhan ekonomi bangsa Indonesia adalah dilandasi oleh ideologinya. Motivasi yang merupakan faktor pendorong masyarakat dalam kebutuhan ekonomi itu ditentukan oleh ideologi dan falsafah Pancasila serta nilai budayanya. Pembangunan sistem ekonomi yang berlandaskan Pancasila juga tidak terlepas dari sejarah Indonesia dari dahulu hingga sekarang dan dari hasil pembangunan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia yang

⁷ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1998), h. 1.

⁸ Lemhannas (Budisantoso Suryosumarto), *Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: PT. New Aqua Press, 1989), Cet. Ke-1, h. 3.

⁹ *Ibid.*

berdasarkan Pancasila itu. Pembangunan dan pembinaan sistem ekonomi Pancasila adalah tidak terlepas dari pembangunan serta pembinaan sistem hukum nasional, pembangunan sistem politik, sistem pertahanan dan keamanan, sistem norma, moral dan sistem lainnya dalam sistem sosial masyarakat Indonesia yang berlandaskan Pancasila.¹⁰

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Namun pada saat sekarang kita belum menggunakan sistem tersebut, hal ini hanya bersifat sementara. Tetapi nantinya akan melaksanakan sistem ekonomi koperasi secara penuh.¹¹

Prof. Dr. Mubyarto mengemukakan bahwa: “Sistem ekonomi koperasi itu tidak berbeda dengan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi Pancasila. Dimana, sistem ekonomi Pancasila itu diidentifikasi sebagai sistem ekonomi koperasi.”¹²

Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan oleh Bung Hatta sebagai tokoh ekonomi sangat jelas mencantumkan tujuan akhir sistem kemakmuran rakyat secara maksimal. Perekonomian harus disusun berdasar demokrasi ekonomi, dimana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran perorangan/individual. Sebab, jika kemakmuran perorangan yang justru diutamakan, maka tampuk produksi akan jatuh ke tangan perorangan yang berkuasa, dan jika ini terjadi rakyat yang jumlahnya banyak akan ditindasnya.¹³

Arah pembangunan, sasaran, bentuk dan jiwa aspek kehidupan ekonomi dan peran pelaku ekonomi, baik dalam tubuhnya masing-masing maupun dalam keterkaitannya satu dengan yang lain, haruslah jelas agar kehidupan ekonomi yang akan dicapai benar-benar sesuai dengan yang dicita-citakan seperti diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Kalau tidak, para pelaku

¹⁰ *Ibid.*, h. 4.

¹¹ Sri – Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UIP, 1980), h. 98.

¹² Mubyarto, *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980), h. 88.

¹³ Mubyarto, *op.cit.*, h. 126.

mungkin tidak akan berperan sebagaimana mestinya dan sasaran kehidupan ekonomi yang dicapai mungkin tidak sesuai dengan yang dicita-citakan.¹⁴

Jiwa dan pedoman kehidupan ekonomi Indonesia adalah Pancasila dan pasal 33 serta pasal-pasal lainnya yang terkait dengan UUD 1945. Namun pedoman tersebut masih perlu diperjelas dalam batas kejiwaannya kedalam bentuk yang mudah dimengerti dan tidak memungkinkan interpretasi yang beragam dalam operasionalisasinya.

Berbagai tantangan yang bersifat teknis dan politis bagi perekonomian Indonesia, maka yang tidak kurang pentingnya adalah tantangan ideologis. Apa yang dinilai baik dan bersumber dari Barat sering kali diperoleh hasil yang sebaliknya ketika diterapkan di negeri kita Indonesia.

Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto ini mendapat banyak kritikan dari para ekonom yang lain, ada yang mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu hanyalah mimpi Mubyarto saja.

Kebijakan-kebijakan ekonomi yang mendasari tatanan perekonomian Indonesia tidak hanya bertumpu pada para ekonom semata, tetapi juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial kultural masyarakat serta aturan-aturan dalam beragama. Melihat komposisi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam dengan acuan hukum dan kaidah serta pedoman mereka bertindak selalu berpijak pada aturan dan hukum Islam, maka secara logis dapat dilihat bahwa masyarakatpun akan melihat kebijakan-kebijakan ekonomi berdasarkan perspektif Islam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang konsep ekonomi Pancasila dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Konsep Prof. Dr. Mubyarto Tentang Ekonomi Pancasila Menurut Perspektif Ekonomi Islam”**.

¹⁴ Lemhannas (Budisantoso Suryosumarto), *op.cit.*, h. 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep ekonomi Pancasila menurut Prof. Dr. Mubyarto?

C. Batasan Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa pemikiran Prof. Dr. Mubyarto menyangkut banyak kajian. Tapi dalam skripsi ini, penulis membatasi permasalahan hanya pada bidang ekonomi Pancasila, yaitu “Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila menurut Perspektif Ekonomi Islam”.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Untuk mengetahui bagaimana konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep ekonomi Pancasila menurut Prof. Dr. Mubyarto.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Akademis, yaitu:

1. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi pengembangan kegiatan penelitian lebih lanjut dalam kasus yang sama.

2. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi khususnya ekonomi syariah tentang ekonomi Pancasila.
 3. Sebagai aplikasi ilmu yang selama ini penulis peroleh dari bangku perkuliahan.
 4. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Kegunaan Praktis, yaitu:
1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai ekonomi Pancasila.
 2. Sumber informasi bagi penerus para ekonom, khususnya pemikir tentang ekonomi Pancasila.

E. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau bahan sekunder yang relevan dengan masalah yang diteliti. Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian deskriptif. Dimana terdapat analisa yang terinci tentang setiap permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

2. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada di perpustakaan. Sumber data tersebut diklasifikasikan menjadi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tertier.

a. Bahan Primer

Merupakan buku yang dikarang oleh Prof. Dr. Mubyarto yang berjudul *Ekonomi Pancasila*.

b. Bahan Sekunder

Berasal dari literatur yang ditulis oleh pemikir lain yang berkenaan dengan pembahasan penelitian ini.

c. Bahan Tertier

Yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus, ensiklopedia, indek kumulatif, makalah, internet dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*), maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni peran aktif mempelajari konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila serta menelaah literatur-literatur kepustakaan lainnya yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. 1, h. 114.

4. Metode Penulisan

Dalam membahas dan menganalisa tersebut, penulis menggunakan metode Deskriptif-Analitik yaitu dengan jalan mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisa Data

Dengan menggunakan content analisis yaitu menganalisis pendapat seseorang kemudian ditambah pendapat lain, lalu diambil kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan adalah sebanyak lima bab. Untuk lebih jelas dan mudah dipahami hasil penelitiannya, maka penulis memaparkan sistematika penulisan ke lima bab tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, uraian penulis yang akan dikemukakan adalah mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI PROF. DR. MUBYARTO

Yang terdiri dari riwayat singkat perjalanan hidup Prof. Dr. Mubyarto, pendidikan dan kepribadian Prof. Dr. Mubyarto, dan karir Prof. Dr. Mubyarto semasa hidupnya serta karya-karyanya.

BAB III : EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM

Pada bab ini yang akan dibahas adalah tentang ekonomi Pancasila, dimana di dalamnya juga akan dibahas pengertian, dasar, sistem dan karakteristik ekonomi Pancasila itu sendiri. Kemudian tentang ekonomi Islam yang dibahas adalah pengertian, dasar atau landasan, sistem, prinsip dan karakteristik ekonomi Islam itu sendiri.

BAB IV: EKONOMI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila dan menjelaskan tinjauan ekonomi Islam terhadap konsep ekonomi Pancasila menurut Prof. Dr. Mubyarto.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang disimpulkan dari pembahasan.

BAB II

BIOGRAFI PROF. DR. MUBYARTO

A. Riwayat Singkat Perjalanan Hidup Prof. Dr. Mubyarto

Mubyarto lahir di Sleman, Yogyakarta tepatnya pada tanggal 3 september 1938. Masa kecilnya hingga sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta.¹

Guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada ini, meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Sardjito Yogyakarta, Selasa 24 Mei 2005 pukul 13.49. Guru Besar ekonomi kelahiran 3 September 1938 itu meninggalkan seorang istri (Sri Hartati Widayati) dan empat orang anak diantaranya Andianto Hidayat, Tantiarini Hidayati, Satriantono Hidayat, dan Dadit Gunarwanto Hidayat serta enam orang cucu.²

Prof. Dr. Mubyarto yang akrab dipanggil Muby itu sempat dirawat secara intensif selama empat hari karena menderita paru-paru basah dan serangan jantung ringan. Jenazah disemayamkan di rumah duka Perumahan Dosen UGM, Sawit Sari C-10 Condongcatur, Depok-Sleman. Untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari civitas akademika UGM, jenazah disemayamkan lebih dulu di Balairung UGM Rabu 25 Mei 2005 pukul 11.00, kemudian dikebumikan di Makam Keluarga UGM di Sawit Sari sekitar pukul 13.00.

Berbagai kalangan datang melayat ke rumah duka di Kompleks Sawit Sari C-10. Diantaranya mantan Dirjen Dikti dan Dubes Unesco Prof. Dr. Bambang Suhendro dan mantan Rektor UNS Prof. Dr. Kunto Wibisono. Juga mantan ketua MPR RI Amien Rais. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang tengah berada di Yogyakarta pada saat itu dalam acara membuka Rakerda

¹ Mubyarto, *op.cit.*, th.

² <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/mubyarto/index.shtml>

Partai Golkar juga menyempatkan diri melayat ke rumah duka bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sultan Hamengku Buwono X, Surya Paloh dan Prof. Dr. Muladi.³

B. Pendidikan dan Kepribadian Prof. Dr. Mubyarto

Prof. Dr. Mubyarto menghabiskan masa kecilnya di Yogyakarta tanah kelahirannya. Beliau memulai pendidikannya dari awal yaitu dari Sekolah Dasar (SD), beliau SD di Demak Jawa Tengah yaitu pada tahun 1950. Setelah beliau menamatkan di SD, maka melanjutkannya ke jenjang selanjutnya yaitu ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri III Yogyakarta tepatnya pada tahun 1953. Dan masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) 1 BOPKRI pada tahun 1956 dan masih berada pada kota yang sama, yaitu Yogyakarta. Tiga tahun berada di jenjang pendidikan SMA, dan menamatkannya pada tahun 1959. Bersamaan dengan tahun ini, beliau masuk ke Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada.⁴

Setelah tamat, tepatnya pada tahun 1962 beliau berangkat ke Amerika Serikat untuk menggali ilmu lebih dalam lagi yaitu masuk ke Vanderbilt University yang kemudian memperoleh gelar MA. Pada tahun 1965 beliau masuk ke Iowa State University yang masih berada di Amerika Serikat (Ph.D). Pada tahun 1979, beliau masuk ke Lembaga Penelitian Pangan Stanford University, California Amerika Serikat.⁵

C. Karir Prof. Dr. Mubyarto Semasa Hidupnya

Profesi utama Mubyarto adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (UGM) yang berawal dari tahun 1959 hingga tahun 2003. Salah satu jabatan penting di dalam

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

karirnya bersama UGM adalah pada saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM dari tahun 1983 hingga tahun 1994. Selama dipimpin oleh Mubyarto, P3PK secara intensif melakukan berbagai penelitian di bidang pedesaan dengan bekerjasama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kemudian pada periode tahun 1987 hingga 1999, ia menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sejak tahun 2002, dia adalah menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PUSTEP) UGM sampai beliau kemudian meninggal pada tahun 2005. Pustep didirikan oleh UGM dibawah pimpinan Rektor Sofyan Efendi, untuk mendalami dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila yang telah ramai menjadi bahan diskusi utama ekonomi Indonesia sejak tahun 1980.⁶

Sebagai birokrat, Mubyarto pernah menjabat sebagai Penasehat Menteri Perdagangan pada tahun 1968 sampai tahun 1971, Asisten Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 1993 hingga tahun 1998, dan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Industri pada tahun yang sama.

Dalam bukunya, “Apa dan Siapa: Sejumlah Orang Indonesia 1985-1986”, konsep Ekonomi Pancasila yang dikembangkan Mubyarto sempat ditertawakan sejumlah kalangan. Konsepnya yang sangat normatif dinilai sangat sulit untuk diterapkan di Indonesia meskipun dikembangkan dari dasar negara Indonesia Pancasila. Satu hal yang selalu disampaikan Mubyarto untuk menjawab kesalahpahaman yang telah terlanjur menjadi pemahaman umum adalah bahwa dia bukan penemu Ekonomi Pancasila. Dia hanya mengembangkan lebih lanjut konsep Ekonomi Pancasila setelah idenya didengungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan pertama kalinya dirumuskan oleh Emil Salim.

⁶ Sri-Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), Cet. ke-2, h. 284.

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto pada tahun 1993 pada saat menjabat sebagai Asisten Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, yaitu menghibahkan dana pemerintah kepada kelompok masyarakat secara musyawarah dengan menggunakan konsep dana bergulir. Program IDT ini adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama dengan koleganya, misalnya yang tergabung di dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE) seperti sosiolog pedesaan IPB Sayogyo dan Direktur LSM Bima Swadaya Bambang Isnawan.⁷

Program IDT sebagai program pengentasan kemiskinan telah berhenti, namun konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto dkk sampai sekarang masih digunakan dalam bentuk program-program lain di berbagai sektor pembangunan di Indonesia.⁸

Kemudian agar lebih jelas, maka penulis akan memberikan poin-poin karir beliau, diantaranya:

1. Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) dari tahun 1959 hingga beliau pensiun,
2. Guru Besar Ekonomi UGM,
3. Direktur Pendidikan Pascasarjana, fakultas Ekonomi UGM dimulai tahun 1976,
4. Direktur Riset Institute Fakultas Ekonomi UGM (1965-1975),
5. Peneliti pada Departement of Economics Research School of Pasific Studies, Australian National University, Canberra, Australia (1971-1972),
6. Konsultan Menteri Perdagangan (1968-1973),
7. Ketua Asosiasi Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi; 1969-1973),
8. Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan UGM (1983-1994),

⁷ *Ibid.*

⁸ Mubyarto, *op.cit.*, th.

9. Direktur Ekonomi Pertanian UGM,
10. Asisten Menteri (Asmen) II Menteri Negara (Meneg) Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas,
11. Staf Ahli Menko Ekuin Bidang Pemerataan Pembangunan, dan penanggulangan Kemiskinan (17 April 1998),
12. Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Pertanian UGM. Pidato pengukuhan berjudul :”Gagasan dan Metode Berfikir Tokoh-Tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya bagi Kemajuan Kemanusiaan” (19 Mei 1979),
13. Pencetus Ide Ekonomi Pancasila.

Kemudian kegiatan lain beliau adalah sebagai anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia yang biasanya disingkat dengan AIPI yakni pada tahun 1991, sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada tahun 1987, anggota Badan Pekerja MPR RI dari tahun 1992-1997, anggota Dewan Riset Nasional Kelompok pada tahun 1994 hingga tahun 1999, Editor Bulletin of Economics Studies, Canberra Australia, dan sebagai Ketua Yayasan Agro Ekonomika pada tahun 1980.⁹

D. Karya-Karya Prof. Dr. Mubyarto

Semasa hidupnya, Prof. Dr. Mubyarto adalah dikenal paling konsern pada ekonomi rakyat. Karya-karya beliau sudah banyak diterbitkan oleh berbagai penerbit dalam bentuk buku dan berbagai bentuk karya-karya lainnya.

⁹ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/mubyarto/index.shtm>.

Adapun buku-buku beliau beserta penerbit, tahun terbit dan kota terbitnya adalah sebagai berikut:

1. Judul: Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan, Penerbit: Yayasan Agro Ekonomika, Tahun Terbit: 1980 dan Kota Terbit: Jakarta.
2. Judul: Moral Ekonomi Pancasila, Penerbit: Yayasan Idayu, Tahun Terbit: 1982 dan Jakarta Kota terbitnya.
3. Judul: Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, Penerbit: LP3ES, Tahun Terbit: 1988 dan Jakarta kota terbitnya.
4. Judul: Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto. Penerbit: Aditya Media, tahun 1997 di Yogyakarta.
5. Judul: Kembali ke Ekonomi Pancasila: Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan, yang diterbitkan oleh Aditya Media pada tahun 1998 di Yogyakarta.
6. Judul: Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan, Penerbit: Aditya Media, Tahun Terbit 1999 di Yogyakarta.
7. Judul: Membangun Sistem Ekonomi dengan Penerbit BPFE pada tahun 200 di Kota Yogyakarta.
8. Judul: Prospek Otonomi Daerah dan Perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi yang diterbitkan oleh BPFE pada tahun 2001 di Yogyakarta.
9. Judul: Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi, dengan penerbit Aditya Media pada tahun 2001 di Yogyakarta.
10. Judul: Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu-Ilmu Sosial, tahun 2002, YAE di Jakarta.

11. Judul: A Development Alternative for Indonesia, diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press di Yogyakarta.
12. Judul: Ekonomi Pancasila: Landasan Pikir dan Misi Pendirian Pusat Studi Ekonomi Pancasila pada tahun 2003 yang diterbitkan oleh BPFE di Yogyakarta.
13. Judul: Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun PUSTEP-UGM pada tahun 2003 oleh Aditya Media di Yogyakarta.¹⁰

Banyak lagi karya-karyanya yang lain, seperti penelitiannya mengenai, *pertama*, Studi Sosial Ekonomi (Sosek), Sosial Budaya (Sosbud), Sosial Politik (Sospol) Barelang. *Kedua*, Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Indonesia.

Kemudian beliau juga memperoleh penghargaan, diantaranya :

- 1) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK),
- 2) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) pada tahun 1971,
- 3) Bintang Jasa Utama dari Presiden tepatnya pada tahun 1994.

¹⁰ *Ibid.*

BAB III

EKONOMI PANCASILA DAN EKONOMI ISLAM

A. Ekonomi Pancasila

1. Pengertian Ekonomi Pancasila

Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi perjuangan, yaitu perjuangan untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan sehingga tercapai Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ekonomi Pancasila, sejalan dengan perjuangan kedaulatan politik, menetapkan dasar pembangunan ekonomi nasional melalui perjuangan kedaulatan ekonomi.¹

Sri-Edi Swasono juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu merupakan ekonomi sosialis yang berakar pada adat-istiadat Indonesia (kolektivisme) dan tuntutan perjuangan bangsa, yang berorientasi pada kelima sila Pancasila itu sendiri.² Dan di dalam buku Gunawan Sumodiningrat yang berjudul sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif, beliau juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.³

Kemudian Mubyarto mendefinisikan ekonomi Pancasila itu dengan ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Kegotongroyongan nasional, bukan

¹ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1988), Cet. Ke-1, h. 18.

² *Ibid.*

³ Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, (Jakarta: IMPAC WAHANA CIPTA, 1999), Cet. Ke-1, h. 1.

hanya kegotongroyongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotongroyongan pada tingkat nasional.⁴

Menurut perspektif historis-konstitusional, ekonomi Pancasila adalah konsep ekonomi yang mencerminkan aspirasi sekaligus kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pembangunan ekonomi itu sendiri. Dinamika aspirasi dan kebutuhan tersebut tercermin dalam GBHN, Repelita, dan APBN / APBD yang terus berubah setiap kurun waktu tertentu.⁵

Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi berjatidiri Indonesia yang mengacu pada sistem nilai dan sistem sosial-budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan etika dan falsafah Pancasila, digali berdasarkan kehidupan ekonomi nyata (real-economic life) rakyat Indonesia. Jadi, Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan jabaran praktis dari ideologi dan ilmu ekonomi yang berdasarkan Pancasila, berazaskan kelima sila yang ada sebagai satu kesatuan.

2. Dasar Ekonomi Pancasila

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.⁶

⁴ Mubyarto, *op.cit.*, h. 32-33.

⁵ Gunawan Sumodiningrat, *op.cit.*, h. 33.

⁶ <http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/m/mubyarto/index.shtml>.

Landasan konstitusional ekonomi Pancasila adalah dipergunakan UUD 1945 terutama pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang merupakan dasar dari pada demokrasi ekonomi dalam negara kita dan tentunya hal ini landasan idiilnya adalah Pancasila. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.⁷

Berdasarkan pasal 33 ini, maka dapat dikemukakan bahwa untuk memecahkan masalah ekonomi adalah ditangani oleh koperasi, swasta dan pemerintah. Yang paling cocok untuk pelaksanaan ayat 1 adalah koperasi. Ayat 2 menunjukkan adanya peranan pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan perekonomian, tetapi dalam batas-batas tertentu, yaitu hanya pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tentu saja kegiatan ekonomi di luar sektor pemerintah dan koperasi, ditangani oleh perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan sebenarnya dapat dilaksanakan berdasarkan jiwa ayat 1, yaitu berdasarkan atas asas kekeluargaan.⁸

3. Sistem Ekonomi Pancasila

Sistem ekonomi Pancasila berisi aturan main kehidupan ekonomi yang mengacu pada ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan

⁷ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1988), Cet. Ke-1, h. 33.

⁸ *Ibid.*, h. 33-34.

masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

Prof. Emil Salim menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Pancasila itulah koperasi dikembangkan, tetapi sekaligus fungsi koperasi adalah mengarahkan perkembangan ekonomi Indonesia ke arah sistem ekonomi Pancasila. Oleh karena itu, hanya dalam sistem ekonomi Pancasila inilah koperasi dapat tumbuh berkembang, penuh isi, makna dan integritas.⁹

Rukmono Markam dalam buku Gunawan Sumodiningrat memandang bahwa, sebenarnya sistem ekonomi Pancasila telah digariskan di dalam GBHN, maka jelaslah bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi berencana, dimana pemerintah memegang peranan yang sangat aktif.¹⁰

Sistem ekonomi Pancasila mencakup kesepakatan aturan main etik sebagai berikut:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: perilaku setiap warga Negara digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab: ada tekad seluruh bangsa untuk mewujudkan pemerataan nasional.
- c. Persatuan nasional: nasionalisme ekonomi.
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: demokrasi ekonomi.
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: desentralisasi dan otonomi daerah.¹¹

Dari sumber lain, dijelaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia mengacu pada nilai-nilai pancasila sebagai sistem nilai bangsa Indonesia yang tujuannya adalah mewujudkan keadilan

⁹ Sri-Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1987), Cet. Ke-2, h. 122.

¹⁰ Gunawan Sumodiningrat, *op.cit.*, h. 59.

¹¹ *Ibid.*

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan salah satu unsur intrinsiknya adalah ekonomi Pancasila yang nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Ketuhanan, dimana roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
- b. Kemanusiaan, yaitu pemerataan sosial, yakni ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.
- c. Kepentingan nasional (Nasionalisme Ekonomi), dimana dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh dan mandiri.
- d. Kepentingan rakyat banyak (Demokrasi Ekonomi), demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan, koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
- e. Keadilan Sosial, yaitu keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas dan bertanggungjawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

4. Karakteristik Ekonomi Pancasila

Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi Pancasila ini adalah sebagai berikut:

1. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral.
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (*egalitarianisme*), sesuai asas-asas kemanusiaan.
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi.

¹² <http://www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id/My%20Web/sembul159.htm>.

4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling kongkrit dari usaha bersama.
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.¹³

Rangsangan kegiatan ekonomi, asas Ketuhanan Yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. Meskipun sukar dibuktikan secara empirik, namun sering dikatakan bahwa kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasuk para pengusaha dan orang-orang kaya, sebenarnya cukup besar.¹⁴

Egalitarianisme, semangat kekeluargaan, cinta mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. *Nasionalisme ekonomi*, semangat ini tampaknya masih selalu menjiwai para pengelola kebijaksanaan dan para pengusaha. Apabila terlihat kesan menyurutnya semangat ini, mungkin hal itu disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional.¹⁵

Masalah koperasi, dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi diharapkan benar-benar menjadi tiang-tiang pokok perekonomian nasional Indonesia. *Perencanaan dan Desentralisasi*, dalam sistem ekonomi Pancasila, kebijaksanaan pembangunan menekankan pada tercapainya keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan putusan-putusan

¹³ Mubyarto, *op.cit.*, h. 53.

¹⁴ *Ibid.*, h. 54.

¹⁵ *Ibid.*, h. 54-55.

ekonomi. Sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah.¹⁶

Adapun ciri-ciri yang lain ekonomi Pancasila ini adalah semangat solidaritas sosial untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan sosial yaitu sila kelima dari Pancasila. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialis, dimana nasib mereka yang tertinggal mendapat perhatian besar. Inilah yang disebutkan dalam pasal 34 UUD 1945, yang berbunyi bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Bahkan apa yang tercantum pada pasal 33, yang selalu dianggap sebagai pedoman dasar pengelolaan perekonomian Indonesia. Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah tujuan perjuangan kemerdekaan Indonesia, tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁷

B. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syari’atnya. Ini baru dari satu sisi, sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur’an al Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa Arab.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h.56-57.

¹⁷ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *op.cit.*, h. 93-94.

¹⁸ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. Ke-2, h. 15.

Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenai pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Andapun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. Itulah sebabnya mengapa perbedaan pokok antara kedua sistem ilmu ekonomi dapat dikemukakan dengan memerhatikan penanganan masalah pilihan.¹⁹

Ekonomi Islam menurut Masudul Alam Choudury adalah “pendekatan terhadap analisis ekonomi yang secara tegas mengarah kepada dasar-dasar syari’ah atau hukum Islam yang berkaitan dengan masalah sosial ekonomi dan masalah hukum yang dihadapi umat Islam.”²⁰

Ada beberapa pengertian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, diantaranya :

a) M. Akram Kan

Secara lepas dapat kita artikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi. Defenisi yang dikemukakan Akram Kan memberikan dimensi normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat) serta dimensi positif (mengorganisir sumber daya alam).

b) Muhammad Abdul Manan

Menurut Manan ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

c) M. Umer Chapra

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. Ke-1, h. 17.

Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang bersikenambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

d) Muhammad Nejatullah Ash-Siddiqy

Ash-Shidiqy mengemukakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.

e) Kursyid Ahmad

Menurut Ahmad ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.²¹

Dari defenisi-defenisi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita simpulkan bahwa ekonomi Islam itu adalah ilmu ekonomi positif (mengorganisir sumber daya alam) dan normatif (kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat). Dan juga ada kecendrungan beberapa ekonom yang sangat mementingkan positivisme dan sama sekali tidak mengajukan pendekatan normatif atau sebaliknya, tentu sangat kita sayangkan.

²¹ *Ibid.*, h. 16-17.

Pendapat para ahli ekonomi Islam tentang pengertian ekonomi Islam yang ditulis oleh Mustafa di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku Sholahuddin. Namun, ada beberapa tambahan ahli ekonomi Islam yang mengemukakan pengertian ekonomi Islam, diantaranya :²²

1) Hasanuzzaman

Menurut Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan Syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat.

2) Naqvy

Ekonomi Islam merupakan studi mengenai representasi perilaku ekonomi umat Islam dalam suatu masyarakat Muslim modern.

3) As Shodr

Ekonomi Islam merupakan mazhab ekonomi Islam, yang menjelma di dalamnya bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian, dengan apa yang dimiliki dan ditunjukkan oleh mazhab ini tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ekonomi, atau nilai sejarah yang ada hubungannya dengan masalah siasat perekonomian, maupun dengan uraian sejarah masyarakat.²³

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bebas, tetapi kebebasannya lebih banyak ditujukan dalam bentuk kerja sama daripada dalam bentuk kompetisi (persaingan). Memang, kerja sama

²² Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 5-6.

²³ *Ibid.*

adalah tema umum dalam organisasi sosial Islam. Individualisme dan kepedulian sosial begitu erat terjalin sehingga bekerja demi kesejahteraan orang lain merupakan cara yang paling dapat memberikan harapan bagi pengembangan daya guna seseorang dan dalam rangka mendapatkan ridha Allah SWT.²⁴

2. Landasan Ekonomi Islam

Hukum berasal dari kata *hukm* dalam bahasa Arab. Artinya norma atau kaidah yang menjadi ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah terjadi, sedang terjadi dan masalah yang akan di hadapi manusia. Oleh karena hukum tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek yang ada di dalam diri maupu di luar diri manusia, seperti jasmani, rohani, keluarga, lingkungan dan lain sebagainya.²⁵

Dalam kegiatan perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Hal-hal yang tidak di atur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara *ijtihad*. Untuk melakukan ijtihad dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, antara lain sebagai berikut:

- 1) Analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya.
- 2) *Mashlahah Mursalah*, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. Ke-1, h. 189.

²⁵ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 25.

- 3) *Ihtihsan*, yaitu meninggalkan dalil-dalil yang umum dan dipandang lebih kuat.
- 4) *Ihtihsab*, yaitu dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada terkecuali terdapat dalil yang menentukan lain.
- 5) Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syari'at.²⁶

Dalam filsafat ilmu, ilmu atau sains dibagi dalam tiga bagian, yaitu Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. Yang dimaksud dengan *Ontologi* adalah segala sesuatu yang bertalian dengan terbentuknya ilmu. *Epistemologi* adalah makna ilmu yaitu tentang seluk beluk ilmu itu sendiri, apa kemampuan dan keterbatasannya. *Aksiologi* adalah segi gunalaksana dari ilmu, yakni hal-hal yang berkenaan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.²⁷

Dalam ruang lingkup ekonomi, maka Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala aspek kehidupan, tentu saja mempunyai cara untuk berekonomi. Dalam kaitan ini Yusuf Halim al-'Alim mendefenisikan ilmu ekonomi Islam sebagai ilmu tentang hukum-hukum Syari'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan mencari, membelanjakan harta. Defenisi ini menunjukkan bahwa fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Al-Qur'an, as-Sunah, *Qiyas* dan *Ijma'* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencari ridha Allah.²⁸

Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa yang menjadi landasan ekonomi Islam itu, diantaranya :

- a. Al-Qur'an,
- b. Al-Hadits,
- c. *Ijtihad*,

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, h. 4-5.

²⁷ Akhmad Mujahidin, *op.cit.*, h. 9.

²⁸ *Ibid.*, h. 11-12.

- d. *Ijma'*,
- e. *Qiyas*,
- f. *Al 'Urf*,
- g. *Al Istihsan*,
- h. *Al Istishlah*,
- i. *Al Istishhab*, dan
- j. *Al Maslahatul Mursalah*.

3. Sistem Ekonomi Islam

Sistem didefinisikan sebagai suatu organisasi berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-unsur tersebut juga saling memengaruhi dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, sistem ekonomi merupakan organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi.²⁹

Jadi, kita bisa mengatakan bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *ijma* dan *qiyas*. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam dan komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT, sebagai ajaran yang sempurna (QS. Al-Maa'idah ayat 3).³⁰

Selanjutnya, Suhrawardi K. Lubis mengatakan bahwa "sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya". Adapun yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah sebagai mana yang diungkapkan oleh Suroso Imam Zadjuli, sebagai berikut:

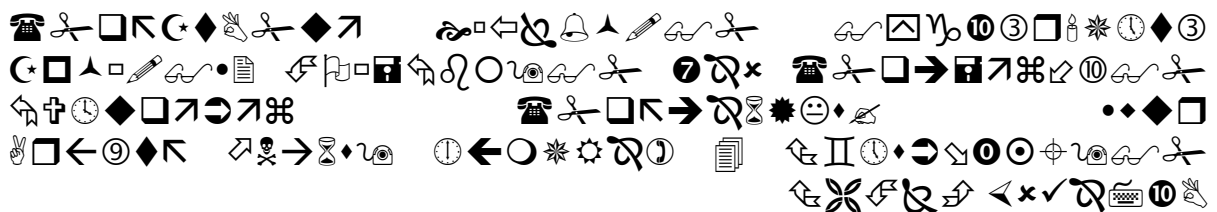
²⁹ Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, h. 11.

³⁰ *Ibid.*

1. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukannya. Dalam sistem ekonomi Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah syari'at. Syari'at Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh baik terhadap individu, keluarga, kelompok masyarakat, usahawan maupun penguasa/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan jasmani maupun rohaniah.
2. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.
3. Motif ekonomi Islam adalah mencari keberuntungan di dunia dan di akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas.”³¹
Hal tersebut didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam perintah yang terdapat dalam

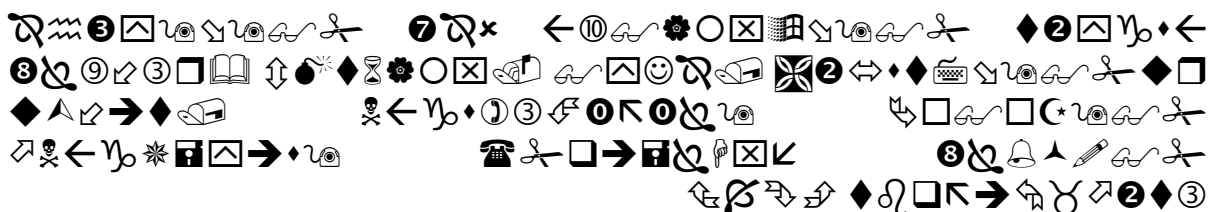
ajaran Islam, yaitu :

- a. Perintah ajaran Islam dilaksanakan di dalam seluruh kegiatan umat Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Dasar perintah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208, yaitu:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

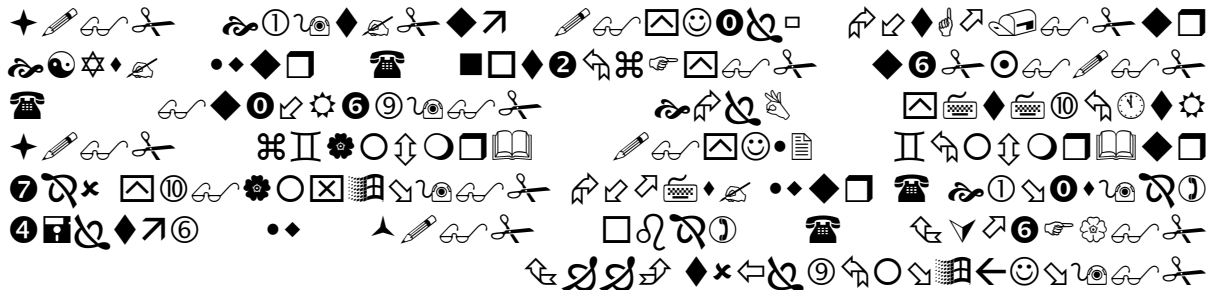
- b. Asas efisiensi dan menjaga kelestarian lingkungan, perihal menjaga efisiensi dan kelestarian lingkungan dapat dilihat dalam ketentuan dalam QS. Ar-Rum: 41, yakni:



³¹ Suhrawardi K. Lubis, *op.cit.*, h. 15.

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

- c. Motif ekonomi adalah keberuntungan di dunia dan akhirat, persoalan motif ekonomi dapat dilihat dalam ketentuan dalam QS. Al-Qasas ayat 77.³²



Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Sistem ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Mustafa dan Suhrawardi di atas, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Heri Sudarsono. Islam telah mengatur kehidupan manusia dengan ketentuan-ketentuan yang semestinya. Keberadaan aturan itu semata-mata untuk menunjukan jalan bagi manusia dalam memperoleh kemuliaan. Kemuliaan hanya bisa didapatkan dengan jalan melakukan kegiatan yang di ridhoi Allah. Sikap manusia yang menghargai kemuliaan akan selalu berusaha menghadirkan Allah dalam setiap tarikan nafasnya.³³

Implementasi dari pemahaman Islam akan membentuk kehidupan Islami dalam masyarakat yang secara langsung akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, diantaranya aspek ekonomi. Oleh karena itu, praktek sistem ekonomi Islam tidak identik dengan sistem

³² *Ibid.*, h. 16.

³³ Heri Sudarsono, *op.cit.*, h. 104.

kenegaraan di beberapa negara Timur Tengah yang menggunakan Islam sebagai dasar negaranya. Sistem ekonomi lebih berkaitan dengan bangunan masyarakat yang perilakunya didasarkan pada sumber Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, dimana sistem ekonomi Islam bisa di praktekkan di masyarakat manapun juga.³⁴

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi Islam harus mempunyai sistem ekonomi yang dapat memakmurkan bumi, mampu membahagiakan manusia baik selama hidup di dunia maupun di akhirat. Sistem ekonomi Islam ini juga mengenal toleransi tetapi ekonomi Islam tidak mengenal kompromi dalam menegakkan keadilan.

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan manusia baik kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentulah hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi panduan dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama yang lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi Islam segalanya bermuara pada aqidah Islam berdasarkan Al-Qur'an al Karim dan As-Sunnah Nabawiyah.³⁵

Selanjutnya, Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa “prinsip-prinsip ekonomi Islam membentuk keseluruhan kerangka, yang jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan sebagaimana divisualisasikan oleh Adiwarmanto.”³⁶

³⁴ *Ibid.*, h. 105.

³⁵ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1, h. 3.

³⁶ Akhmad Mujahidin, *op.cit.*, h. 12-13.

Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: tauhid (keimanan), ‘*adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khilafah* (pemerintahan), dan *ma’ad* (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam. Dari kelima nilai ini kita dapat menurunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Prinsip derivatif tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Multyre Ownership* (kepemilikan multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *multitype ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta dalam kepemilikan sosial, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara atau campuran.

Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid: pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.

2. *Freedom to Act* (kebebasan untuk bergerak/usaha)

Freedom to Act bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi dikurangi dengan menghayati nilai keadilan. Penegakan nilai keadilan dalam ekonomi dilakukan dengan melarang semua *mafsadah* (segala yang merusak), *ribha*, *gharar* dan *maisir*.

3. *Sosial Justice* (keadilan sosial)

Gabungan dari nilai *khilafah* dan *ma’ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Sekarang kita telah memiliki

landasan teori yang kuat, serta prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang mantap. Namun dua hal ini belum cukup, karena teori dan sistem menurut adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam teori dan sistem tersebut.³⁷

Masudul Alam Choudhury mengemukakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Menurutnya, “ekonomi Islam tidak cukup puas dengan cara pandang analisis ekonomi konvensional”. Hal ini karena ekonomi Islam termotivasi oleh prinsip :

- a. Prinsip tauhid dan persaudaraan
- b. Prinsip kerja dan produktifitas
- c. Prinsip distribusi harta.³⁸

5. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam, diantaranya:

- a. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
- b. Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
- c. Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dan konvensional.³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 25-27.

³⁸ Muhandis Natadiwirya, *op.cit.*, h. 20-21.

³⁹ Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, h. 18.

Sedangkan sumber karakteristik ekonomi Islam adalah Islam itu sendiri yang meliputi tiga asas pokok. Ketiganya secara asasi dan bersama mengatur teori ekonomi dalam Islam, yaitu asas akidah, akhlak dan asas hukum (muamalah).⁴⁰

Dalam hukum syara' dijelaskan bagaimana seharusnya harta kekayaan diperoleh, juga menjelaskan bagaimana manusia mengelola harta serta bagaimana mendistribusikan kekayaan yang ada. Inilah yang sesungguhnya dianggap oleh Islam sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Atas dasar ini, maka asas-asas ekonomi Islam yang digunakan untuk membangun sistem ekonomi berdiri atas tiga asas (fundamental) yaitu: bagaimana harta diperoleh yakni menyangkut hak milik (*tamalluk*), pengelolaan (*tasharruf*) hak milik, serta distribusi kekayaan di tengah masyarakat.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sholahuddin, *op.cit.*, h. 32.

BAB IV

EKONOMI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila

Mubyarto mendefinisikan ekonomi Pancasila ini dengan ekonomi yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional. Kegotongroyongan nasional, bukan hanya kegotongroyongan di pedesaan, di rukun kampung, tetapi kegotongroyongan pada tingkat nasional.¹

Beliau juga mengatakan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem perekonomian yang berbeda dengan sistem ekonomi Kapitalis atau sistem ekonomi Komunis.² Adapun pengertian dari sistem ekonomi Kapitalis itu sendiri adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian dan pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur. Sedangkan sistem ekonomi Komunis itu adalah suatu sistem perekonomian, dimana peran pemerintah hanyalah sebagai pengatur sumber-sumber kegiatan perekonomian atau disebut juga dengan pemerintahan yang otoriter.

Sri-Edi Swasono juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu merupakan ekonomi sosialis yang berakar pada adat-istiadat Indonesia (kolektivisme) dan tuntutan perjuangan bangsa, yang berorientasi pada kelima sila Pancasila itu sendiri.³ Dan di dalam buku Gunawan

¹ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), Cet. Ke-1, h. 31-32.

² *Ibid.*

³ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *loc.cit.*

Sumodiningrat yang berjudul sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif, beliau juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.⁴

Adapun tujuan dari ekonomi Pancasila menurut Mubyarto terdapat dalam UUD 1945 yaitu tiga pasal yang menyangkut kesejahteraan sosial dan keadilan sosial, baik yang berupa hak warga negara maupun kewajiban negara terhadap warganya. Pasal itu adalah pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Pasal 27 ayat 2 menyatakan dengan tegas bahwa, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa negara memang mempunyai kewajiban moral dan materil untuk sedapat mungkin menciptakan pekerjaan bagi setiap orang yang mau, mampu dan ingin bekerja, sehingga dapat menikmati hidup yang layak. Dan lebih lanjut lagi, bagi mereka yang telah berusaha keras namun tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan, termasuk di dalamnya fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, maka negara wajib memelihara mereka. Inilah ketentuan pasal 34 UUD 1945.⁵

Dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa konsep ekonomi Pancasila menurut Prof. Dr. Mubyarto adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada sila ke lima Pancasila, namun berbeda dari sistem ekonomi Kapitalis dan Komunis.

Adapun program-program yang diluncurkan oleh Mubyarto adalah ekonomi kerakyatan yang diberdayakan melalui koperasi, pembangunan prasarana desa dan pinjaman dana bergulir

⁴ Gunawan Sumodiningrat, *loc.cit.*

⁵ Mubyarto, *op.cit.*, h. 67.

melalui program Inpres Desa Tertinggal atau yang disebut juga dengan program IDT yang tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Dimana, pada saat itu beliau (Mubyarto) menjabat sebagai staf ahli Menteri Koordinator Bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberantasan Kemiskinan.⁶

Adapun ciri pembangunan ekonomi kerakyatan versi Mubyarto ini adalah fokus pada pemberantasan kemiskinan dan dilaksanakan melalui desentralisasi sebagai wujud dari pemerataan pembangunan.⁷

Dalam buku Sri-Edi Swasono yang berjudul *sistem ekonomi dan demokrasi ekonomi*, Prof. Dr. Mubyarto menjelaskan lima ciri ekonomi Pancasila, yaitu:

1. Adanya rangsangan ekonomi, moral dan sosial. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa kiranya jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. Kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia termasuk para pengusaha dan orang-orang kaya, sebenarnya cukup besar.
2. Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradap.
3. Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh dan nasionalisme. Bagi Indonesia, semangat nasionalisme ekonomi ini tampaknya masih selalu menjiwai para pengelola kebijaksanaan dan para pengusaha. Apabila terlihat kesan

⁶ <http://forum.detik.com/ekonomi-kerakyatan>.

⁷ *Ibid.*

menyurutnya semangat ini, mungkin hal itu disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional.

4. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkrit dari usaha bersama. Banyak para ahli yang mengatakan bahwa hari depan sistem ekonomi Pancasila diwarnai oleh koperasi yang maju dan berkembang yang bergiat dalam semua sektor kehidupan ekonomi.
5. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Dalam sistem ekonomi Pancasila, kebijaksanaan pembangunan menekankan pada tercapainya keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan putusan-putusan ekonomi. Sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah.⁸

Dari kelima ciri ekonomi Pancasila di atas, sudah tentu berkaitan erat satu sama lain, sehingga memang sebaiknya tidak dipisah-pisahkan dan selalu dilihat sebagai lima ciri yang bulat dan terpadu.

Di samping ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila menurut Mubyarto di atas, Soeharsono Sagir menjelaskan *aktualisasi* (pelaksanaan) sistem ekonomi dengan muatan nilai Pancasila menurut para ahli ekonomi yang mencakup kelima sila Pancasila, yaitu sebagai berikut:

⁸ Sri-Edi Swasono, *op.cit.*, h. 147.

Tabel I
Pelaksanaan Sistem Ekonomi dengan Muatan Nilai Pancasila
Menurut Para Ahli Ekonomi⁹

Sila	Emil Salim	Mubyarto	Sumitro Djojohadikusumo
1	Mengenal etika dan moral agama.	Roda ekonomi digerakkan rangsangan ekonomi.	Ikhtiar untuk senantiasa hidup dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa.
2	Titik berat pada nuansa manusiawi dalam menggalang hubungan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.	Ada kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai dengan asas persamaan dan kemanusiaan.	Ikhtiar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran dalam kehidupan masyarakat.
3	Membuka kesempatan dan perlindungan ekonomi secara adil bagi semua pihak terlepas dari kedudukan, suku, agama, ataupun daerah.	Nasionalisme dan isu kepentingan nasional menjadi jiwa atas setiap kebijakan ekonomi.	Pola kebijakan ekonomi dan cara penyelenggaraan perekonomian tidak sampai menimbulkan kekuatan yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
4	Bermuara pada pelaksanaan demokrasi ekonomi dan politik.	Koperasi merupakan saka guru perekonomian dan mewakili bentuk paling konkret dari usaha bersama.	Rakyat berperan dan punya partisipasi aktif dalam usaha pembangunan.
5	Memberi warna <i>egalitarian</i> dan <i>social equity</i> dalam proses pembangunan.	Imbangan yang tegas antara perencanaan di tingkat nasional dan desentralisasi daerah otonom.	Pola pembagian hasil produksi lebih merata antargolongan, daerah, kota-desa.

⁹ Soeharsono Sagir, dkk, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, h. 10.

Dari tabel di atas, maka dapat kita lihat bahwa pelaksanaan dari sistem ekonomi Pancasila dengan muatan nilai Pancasila menurut para ahli tersebut memberikan konsep yang berbeda, namun memiliki makna dan tujuan yang sama.

Dalam konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto dalam buku *Wawasan Ekonomi Pancasila*, memiliki peranan unsur agama yang kuat. Maka, jelas kita lihat bahwa unsur moral dapat menjadi salah satu pendorong utama pemikiran dan kegiatan ekonomi. Ini berbeda sekali dengan semangat liberalisme dimana peranan ilmu-ilmu pengetahuan yang menonjol berakibat merenggankan hubungan antara agama dengan semangat perdagangan dan berekonomi.¹⁰

Di negara kita Indonesia pandangan hidup Pancasila memberi dasar kuat pada konsep ekonomi yang berdasar moral, lebih-lebih setelah runtuhnya paham komunisme tahun 1965, dimana terjadi kebangkitan kembali semangat Pancasila. Berhubung dengan itu, ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini berbeda dengan teori ekonomi klasik, terutama dalam aspek moralnya yang bersumber pada nilai-nilai agama.¹¹

Dari penjelasan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur dan nilai-nilai agama yang terkandung didalamnya. Hal ini akan dijelaskan lebih terperinci pada poin tinjauan Islam terhadap konsep Mubyarto tentang ekonomi Pancasila di bawah ini.

A. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Konsep Ekonomi Pancasila menurut Prof. Dr. Mubyarto

¹⁰ Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *op.cit.*, h. 88-89.

¹¹ *Ibid.*

Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto yaitu sistem perekonomian yang berasaskan kekeluargaan, sebagaimana yang juga tercantum dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dengan tujuan keadilan dan pemerataan.

Dalam ekonomi Islam, demokrasi ekonomi berfokus pada penciptaan keadilan ekonomi. Islam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi masyarakat tetapi pertumbuhan yang merata dan adil, bukan kesenjangan, seperti di negara kapitalis. Islam tidak menginginkan harta kekayaan bertumpuk pada kelompok tertentu saja.¹² Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya surat Al-Hasyr (59) ayat 7, yaitu:



Artinya: “...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu...”.

Bangsa Indonesia yang berideologi Pancasila sebagai nilai-nilai dasar landasan kehidupannya, percaya bahwa moral kehidupan ekonominya berlandaskan moral Pancasila. Di Indonesia juga diakui eksistensi dan hak hidup beberapa agama besar (Pasal 29 ayat 2 UUD 1945), nilai-nilai yang dikembangkan berasal dari berbagai agama termasuk nilai-nilai adat asli bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai suku bangsa. Dalam pada itu, karena agama Islam dianut oleh bagian terbesar bangsa Indonesia, tampaknya juga paling besar peranannya dalam mempengaruhi aturan-aturan nilainya. Misalnya pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengatakan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹³ Ayat ini tampaknya sejalan dengan ayat-ayat kitab suci Al-Qur’an surat An-Nisaa’ ayat 1 dan surat Al-Hujuraat ayat 10, sebagai berikut:

¹² Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 133.

¹³ Mubyarto, *op.cit.* h. 57-58.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ
رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."¹⁴

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara..."¹⁵

Dari kedua ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa menurut agama Islam, suatu bangsa adalah keluarga besar yang harus selalu bekerja sama dalam hidup berekonomi dan tidak dibenarkan bersaing yang berakibat saling mematikan.

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau Ideologi Islam, sementara ekonomi Pancasila bersumber dari ideologi Pancasila atau turunan Pancasila. Perekonomian dalam Islam adalah perekonomian berdasarkan tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk "Reference Frame Work" yang akan menjadi

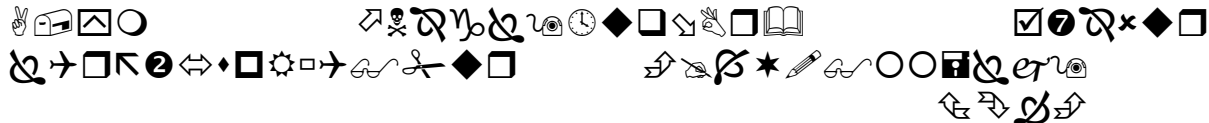
¹⁴ Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2004), h. 70-71.

¹⁵ *Ibid.*, h. 465-466.

pedoman dalam berbisnis dan usaha. Jadi jelas letak nilai-nilai perbedaannya mengacu pada ideologi yang dianut, meskipun banyak pula kesamaannya.¹⁶

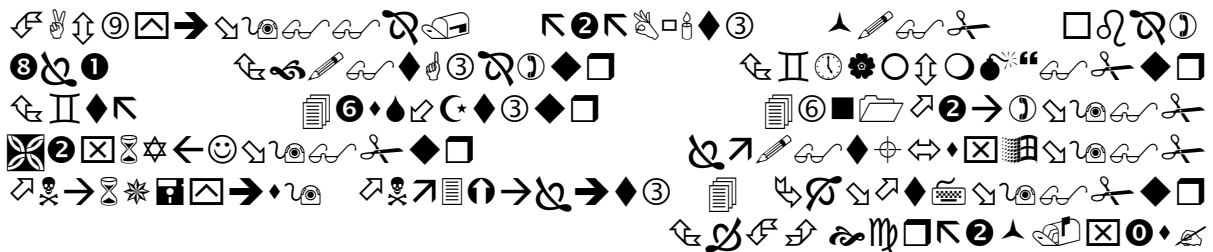
Letak kesamaannya adalah sebagai berikut :

1. Kedua sistem ini memiliki visi sosial dan moral seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An Naml (27) ayat 5, yaitu:



Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

2. Bersama-sama ingin mewujudkan keadilan dan pemerataan sosial bahkan jaminan sosial dan hal ini juga sejalan dengan surat An-Nahl (16) ayat 90:



*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.*¹⁷

3. Nasionalisme ekonomi, semangat kekeluargaan, cinta mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial.

¹⁶ Diambil dari internet, yang di akses pada tanggal 30 Juni 2010 dengan situs “<http://www.spi.or.id/wp-content/uploads/PDF/001.pdf>”.

¹⁷ Ibid., h. 221.

4. Koperasi (*Baitul Mal Wa Tamwil*) menjadi kekuatan dalam berekonomi yang bervisi pada orang-orang kecil.
5. Kesamaan dalam keseimbangan dalam implementasi kebijakan ekonomi.¹⁸

Di Indonesia, meskipun Islam merupakan agama mayoritas, sistem ekonomi Islam secara penuh sulit diterapkan, tetapi sistem ekonomi Pancasila yang dapat mencakup warga non Islam kiranya dapat dikembangkan. Merujuk pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, sistem ekonomi Pancasila menekankan pada moral Pancasila yang menjunjung tinggi asas keadilan ekonomi dan keadilan sosial seperti halnya sistem ekonomi Islam.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditandai dengan adanya persamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan yang diwujudkan melalui dasar-dasar kemanusiaan dengan cara-cara yang nasionalistik dan demokratis.

Adapun alasan penulis mengatakan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam adalah karena di dalam buku primer yang diteliti oleh penulis, menyebutkan bahwa tujuan dari ekonomi Pancasila itu sama dengan tujuan ekonomi yang perintahkan oleh Islam. Dan juga, program-program ekonomi Pancasila yang dikembangkan beliau (Mubyarto) seperti, ekonomi kerakyatan, koperasi, pembangunan prasarana desa dan pinjaman dana bergulir juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.

¹⁸ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membahas konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila menurut perspektif ekonomi Islam, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila.

Dari penjelasan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa ekonomi Pancasila menurut Mubyarto adalah sistem ekonomi yang merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan sebagaimana yang tertuang pada sila kelima Pancasila yang merupakan tujuan dari ekonomi Pancasila itu sendiri.

2. Ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mubyarto.

Dari penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto ini sejalan dengan konsep ekonomi dalam Islam. Hal ini ditandai dengan adanya kesamaan tujuan, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dipaparkan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini, seluruh insan akademisi dapat lebih memahami konsep Prof. Dr. Mubyarto tentang ekonomi Pancasila.
2. Bagi para cendekiawan Muslim khususnya, hendaknya dapat meneliti lebih lanjut pendapat-pendapat lain dari pendapat Prof. Dr. Mubyarto agar dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Diharapkan pada pemerintah agar melaksanakan strategi pembangunan ekonomi yang sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila yang dikembangkan oleh Mubyarto.
4. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya dan sangat jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan juga kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Sritua, *Ekonomi Kerakyatan: Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002).
- , *Ekonomi Kerakyatan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001).
- Bedjoui, Mohammad, *Menuju Tata Ekonomi Dunia Baru*, (Jakarta: Gunung Agung, 1985), Cet. Ke-2.
- Depag Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2004).
- Halwani, Hendra, *Ekonomi Intenasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), edisi ke-2.
- Huda, Nurul, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1.
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Ed. Ke-1, Cet. Ke-2.
- Madjid, Abdul dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila*, (Jakarta: UI Press, 1988), Cet. Ke-1.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007).
- Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1987), Cet. Ke-1.
- , *Ekonomi Pancasila*, (Yogyakarta: BPFE-UGM, 2002).
- , *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Agro Ekonomika, 1980).
- , *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995).
- , *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1988).

- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. Ke-1.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed. 1, Cet. Ke-2.
- Natadiwiry, Muhandis, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), Cet. Ke-1.
- Raharjo, Dawam, *Pragmatisme dan Utopia, Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1992).
- Sagir, Soeharsono, dkk, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1.
- Saleh, Irsan Azhary, *Industri Kecil sebuah Tinjauan dan Perbandingan*, (Jakarta: LP3ES, 1986), Cet. Ke-1.
- Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1.
- Soesastro, Hadi, dkk, *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, (Jakarta: KANISIUS, 2005), Cet. Ke-1.
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).
- Swasono, Sri – Edi, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), Cet. ke-2.
- , *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UIP, 1980).
- Zawawi, Ali dan Saifullah Ma'shum, *Penjelasan Al-Qur'an tentang Krisis Sosial, Ekonomi dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), Cet. Ke-1.
- Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003), Ed. Ke-1, Cet. Ke-1.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitra Wardika dilahirkan di Sungai Alah Kec. Hulu Kuantan Kab. Kuantan Singingi, tepatnya pada hari Selasa tanggal 11 Maret 1987 dari pasangan **Dasril** dan **Nurjasmiwati** yang merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), yaitu SDN 041 Sungai Alah pada tahun 1993 dan tamat tahun 1999.

Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP), yakni SMPN 03 Lubuk Ambacang pada tahun yang sama dan tamat pada tahun 2002. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) tepatnya pada SMAN 01 Kuantan Mudik dan tamat pada tahun 2005.

Pada bulan Juli, tepatnya pertengahan tahun 2005 penulis masuk ke UIN SUSKA Riau melalui tes ujian lokal dan mengambil jurusan D3 Perbankan Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, kemudian tamat pada bulan Agustus 2008 dengan judul Laporan Akhir “**Sistem Pembayaran Premi dan Klaim Dana Mitra Iqra’ pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah Kantor Cabang Pekanbaru**”.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan ke S1 jurusan Ekonomi Islam pada fakultas yang sama dan menamatkan pada tahun 2010 dengan judul skripsi “**Konsep Prof. Dr. Mubyarto Tentang Ekonomi Pancasila Menurut Perspektif Ekonomi Islam**” di bawah bimbingan **Drs. H. Ahmad Darbi B, M.Ag.** Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tanggal 20 Oktober 2010, maka penulis dinyatakan “**Lulus**” dengan predikat kelulusan “**Sangat Memuaskan**” dengan IPK 3,33 dan telah menyandang gelar “**Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**”.